



## PERAN DP3AP2KB DALAM MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* DI KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI

**Ardi Darmawan Saputra<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menurunkan angka *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran DP3AP2KB dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan *Stunting*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data didasarkan pada teori peran pemerintah menurut Rasyid yang meliputi peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi belum menetapkan Peraturan Daerah khusus sebagai dasar hukum penanganan *Stunting* dan masih berpedoman pada Surat Keputusan Wali Kota. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala, serta melaksanakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*. Penanganan *Stunting* juga didukung oleh sarana, prasarana, serta pendanaan dari APBD dan pihak swasta. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan angka *Stunting* sebesar 10,27 persen, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas implementasi program secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peran, *Stunting*.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of the Women's Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning Office (DP3AP2KB) in reducing Stunting rates in North Cimahi District, Cimahi City. The main problem in this study is the suboptimal role of DP3AP2KB in implementing Stunting management and prevention. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and documentation and literature studies. Data analysis is based on Rasyid's theory of government roles, which include the roles of regulator, dynamicator, facilitator, and catalyst. The results show that the Cimahi City Government has not yet established a specific Regional Regulation as a legal basis for Stunting management and is still guided by the Mayor's Decree. Nevertheless, the government has conducted regular socialization, monitoring, and evaluation, and implemented the Foster Parents Movement to Prevent Stunting program. Stunting management is also supported by facilities, infrastructure, and funding from the*

*Regional Budget (APBD) and the private sector. However, in 2025, there will be an increase in the Stunting rate of 10.27 percent, so it is necessary to strengthen policies and increase the effectiveness of program implementation on a sustainable basis.*

**Keywords:** Role, Stunting.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Segenap upaya pembangunan dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mendorong perubahan, yang sehingga daerah menjadi maju. Sekarang ini, daerah dituntut untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas suatu daerah yang tidak lepas dari kerjasama antara pihak swasta maupun masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih merata, Negara Indonesia dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 amandemen ke dua yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Salah satu tantangan dalam otonomi daerah saat ini adalah pembangunan Kesehatan, yang mana salah satu isu nasional yang selalu muncul adalah masalah *Stunting*. WHO telah menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa prevalensi *Stunting* di Indonesia masih melebihi batas prevalensi yang telah ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%. (Kemenkes, 2021).

Penanganan permasalahan stunting di Kota Cimahi tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3AP2KB semata, melainkan juga membutuhkan

partisipasi aktif dari semua pihak. Adapun jumlah penderita stunting di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah
1	Cimahi Utara	308
2	Cimahi Tengah	1.253
3	Cimahi Selatan	1.329
	Jumlah Total	2.890

Sumber: Data hasil olahan peneliti

Adapun lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Cimahi Utara dengan alasan bahwa Kecamatan Cimahi Utara adalah Kecamatan dengan jumlah ballita stunting sangat rendah yaitu 308 bayi penderita stunting, meskipun jumlah tersebut tidak terlalu besar namun bayi penderita stunting perlu mendapat perhatian ditengah upaya menuju Kota Cimahi “zero stunting”.

Kota Cimahi merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka *Stunting* cukup tinggi dan berada di urutan ke-2 di Jawa Barat, berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2024, di Kota dari 29.192 orang balita terdapat 2.890 balita dalam kondisi *Stunting*, jika diprosentasekan jumlah balita *Stunting* di Kota Cimahi adalah 9,89% dari jumlah balita yang ada. Dari data tersebut, angka prevalensi *Stunting* untuk Kecamatan Cimahi Utara adalah sebesar 10,64% artinya di Kecamatan Cimahi Utara terdapat 308 bayi penderita *Stunting*. Kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa peran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menurunkan Angka *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari:

Pertama, belum ada Peraturan Daerah atau sejenisnya yang merupakan turunan aturan tingkat atasnya tentang penanganan *Stunting*.

Kedua, ketidakjelasan dalam pemberian Program Pemantauan Tumbuh Kembang (PMT) yang dilakukan oleh DP3AP2KB, yang mana berdasarkan pengamatan peneliti belum mencakup secara tepat identifikasi secara spesifik berdasarkan nama dan alamat rumah tangga yang mempunyai balita *Stunting*.

Ketiga, belum optimalnya kerjasama dalam beberapa kegiatan penanganan *Stunting* yang dijalankan oleh DP3AP2KB dengan beberapa instansi terkait lainnya seperti dengan Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Diskominfo dan pemangku kepentingan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Studi dokumentasi dan kepustakaan serta observasi. Adapun yang menjadi informannya adalah: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, Ketua PKK Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, petugas kesehatan Puskesmas di Kecamatan Cimahi Utara, Kader Posyandu di Kecamatan Cimahi Utara dan masyarakat yang mempunyai anak *Stunting*.

## **PEMBAHASAN**

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anter - Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (IoJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 - 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Cimahi - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dan lain-lain). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staad blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif (PP no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan

Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Pada tahun 2001, Cimahi resmi menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001. Sejak saat itu, Cimahi mengalami pertumbuhan pesat, baik dari segi penduduk, ekonomi, maupun infrastruktur. Sebagai Kota Otonom, Kota Cimahi terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan. Adapun daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan/Kelurahan	Kelurahan
1	Cimahi Selatan	Cibeber, Cibereum, Leuwigajah, Melong dan Utama
2	Cimahi Tengah	Baros, Cigugur Tengah, Cimahi, Karangmekar, Padasuka dan Setiamanah
3	Cimahi Utara	Cibabat, Cipageran, Citereup dan Pasirkaliki

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2025.

Stunting merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah stunting, namun tetap saja setiap tahun prevalensi stunting tetap saja meningkat. Salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan yang mengatur pencegahan stunting di Indonesia.

Dalam Menurunkan Angka *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara, peran sebagai regulator dapat dilihat dari Pemerintah Kota Cimahi Surat Keputusan Gubernur tersebut, Wali Kota Cimahi mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 050/Kep.865-Bappeda/2021 Tentang Tim Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi telah berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan

*Stunting* secara maksimal. Hal ini terlihat dari kegiatan Rembuk *Stunting* yang dihadiri oleh 84 orang peserta yang terdiri dari unsur perwakilan Forkopimda, SKPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan. Rembuk *Stunting* bertujuan sebagai penguatan komitmen, yang mana Pemerintah Kota Cimahi memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting* yang dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Dalam menurunkan angka *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara dilakukan juga sosialisasi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* ke semua lapisan masyarakat termasuk ke kalangan generasi muda. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook (fb), Instagram (Ig) dan lainnya. Yang mana dewasa ini hampir semua lapisan masyarakat mempunyai media sosial sebagai salah satu alat komunikasi sehari-hari. Menurut penulsi, penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi dan penyebaran informasi akan sangat efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat.

Peran DP3AP2KB dalam penurunan *Stunting* di Kota Cimahi khususnya di Kecamatan Cimahi Utara dapat dilihat dari keterbukaan dan keadilan dalam mendapatkan informasi yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan maupun kota, dimana Camat Kecamatan Cimahi Utara, dan DP3AP2KB sudah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Peran sebagai dinamisator, dapat dilihat dari peran Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara secara periodik (semester dan tahunan) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja intervensi penanganan *Stunting* dalam rangka Untuk mengawal pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting*, Dalam pencegahan dan penanganan *Stunting* DP3AP2KB Kota Cimahi meluncurkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING), yang mendorong peran aktif masyarakat dalam membantu anak-anak berisiko *Stunting* agar mendapatkan asupan gizi dan perawatan yang

layak. Dalam Program tersebut, Seluruh masyarakat bisa ikut serta dalam program tersebut. Mulai dari individu, komunitas, perusahaan, ASN, dan siapa saja yang memiliki kepedulian dan ingin berkontribusi dalam mensukseskan program tersebut. Program Genting merupakan sebuah gerakan kolaborasi untuk memastikan setiap anak mendapatkan nutrisi terbaik di masa pertumbuhan krusial mereka. Masyarakat dapat berkesempatan menjadi orang tua asuh yang memberikan dukungan nutrisi, sanitasi, air bersih dan edukasi kesehatan kepada keluarga berisiko *Stunting* di seluruh wilayah Kota Cimahi.

Peran sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan kesehatan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya. Peran ini dapat dilihat dari tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di seluruh wilayah Kota Cimahi termasuk di wilayah Kecamatan Cimahi Utara oleh DP3AP2KB Kota Cimahi. Namun demikian, dalam penelitian ditemukan untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Gedung Sekretariat P2TP2A, Gudang Arsip, statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk sarana Kesehatan seperti Puskesmas sudah tersedia di semua kelurahan dan pos yandu sudah tersedia di setiap RW.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi di bidang kesehatan. Negara diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di seluruh wilayah Kota Cimahi termasuk di wilayah Kecamatan Cimahi Utara oleh DP3AP2KB Kota Cimahi merupakan suatu keharusan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang serius, khususnya di Indonesia. Kondisi ini diakibatkan oleh kekurangan asupan gizi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, terutama selama seribu hari pertama kehidupan seorang anak. Masalah stunting membutuhkan fokus yang lebih intens, karena pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak dapat sangat mendalam dan berkepanjangan, yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka jika tidak ditangani dengan tepat.

Penanggulangan *Stunting* harus rutin diadakan dan dilakukan secara terus menerus. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* harus ditopang oleh tercukupinya dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, dan APBD Provinsi dan tidak menutup kemungkinan ada dukungan dana dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara mendapat dukungan dana dari APBD Kota Cimahi. Selain Pemerintah Kota Cimahi mendapat bantuan dukungan dana sebesar Rp 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul). anak suspek *Stunting* di Kota Cimahi mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 500.000 setiap bulan untuk pemenuhan asupan nutrisi anak. Bantuan ini akan diberikan selama empat bulan dimulai periode Juni hingga September 2024.

Pemerintah Kota Cimahi juga mendapat dana insentif fiskal penurunan *Stunting* dari kementerian keuangan sebesar Rp.5,76 Milyar. Dana ini diberikan sebagai penghargaan atas Kinerja Tahun Berjalan dalam Kategori Kesejahteraan Masyarakat. Adapun pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan intervensi paket gizi lengkap untuk ibu hamil dan anak, pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada, pelatihan pengasuhan anak, menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kekurangan gizi, pembinaan sanitasi yang baik dan penyediaan air bersih, sehingga diharapkan angka kejadian *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara dapat menurun.

Peran Pemerintah sebagai katalisator, dapat dilihat dari upaya pencegahan dan penanganan *Stunting*, Percepatan penurunan *Stunting* pada balita adalah program prioritas Pemerintah, Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan pada kecamatan maupun desa atau kelurahan di wilayahnya, Sementara Pemerintah Desa atau Kelurahan, memainkan peranan yang sangat penting karena dari desa lah data sasaran intervensi pencegahan *Stunting* dikumpulkan. Kepala desa harus memastikan program tepat sasaran. Untuk memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan *Stunting* di tingkat desa atau kelurahan direkrutlah Kader Pembangunan Manusia. Kader Posyandu maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu maupun TPK memegang peran yang sangat penting terutama dalam menangani *Stunting*, terutama dalam pada masa balita. Misalnya, Kader Posyandu menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat untuk memeriksa pertumbuhan bayi dan balita mereka. Dengan demikian, kader Posyandu mempunyai tanggung jawab besar dalam melaksanakan kegiatan Posyandu, di mana mereka diharapkan aktif dalam mendeteksi status gizi balita secara dini.

Pemerintah Kota Cimahi membentuk Tim Percepatan Penanganan *Stunting* Tingkat Kota, dan juga dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Cimahi dan didukung pula oleh oleh kader-kader baik itu Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi, untuk menurunkan angka *Stunting* seperti Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Cimahi Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi pada tanggal 30 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa kegiatan yang dihadiri sekitar 125 peserta ini diinisiasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi dengan melibatkan unsur perangkat daerah, TP PKK Kota Cimahi, hingga TP PKK Kecamatan dan Kelurahan. Rakor ini menghadirkan narasumber dari Tim Kerja Bidang

Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu, Pemerintah Kota Cimahi melakukan program intervensi gizi, seperti pemberian makanan bergizi tambahan dan suplemen atau vitamin yang diperlukan oleh balita maupun ibu hamil. Selain intervensi gizi, Pemerintah Kota Cimahi juga memperkuat aspek lingkungan dan sanitasi, dengan memperbaiki kualitas sanitasi dengan penyediaan septic tank individual dan komunal agar Cimahi Kota terbebas dari buang air besar sembarangan. Rencananya Tahun 2026 akan dibangun Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga (IPRT) dan IPAL komunal. Pemerintah Kota Cimahi juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas air bersih.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan penurunan angka *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara oleh DP3AP2KB sudah dilakukan dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Kota Cimahi, dan juga dilakukannya sosialisasi kepada semua masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi juga melakukan Rembuk *Stunting* sebagai komitmen untuk menurunkan angka *Stunting*. Disamping itu diluncurkan pula Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING). Program penurunan angka *Stunting* mendapat dukungan pula dari sector swasta, dimana Pemerintah Kota Cimahi mendapat bantuan dukungan dana sebesar Rp 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Untuk tingkat kecamatan dan kelurahan dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Cimahi dan didukung pula oleh oleh kader-kader baik itu Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Beberapa saran yang penulis ajukan dalam penurunan angka *Stunting* di Kecamatan Cimahi Utara, yaitu: Pemerintah Kota Cimahi hendaknya mengeluarkan Peraturan Daerah untuk pencegahan dan penanganan *Stunting*, Pemerintah Kota Cimahi hendaknya melakukan penguatan kelembagaan baik untuk aparat terkait, kader, maupun aparat kewilayahan lainnya (RT dan RW) terutama yang masyarakat yang keluarganya mempunyai balita *Stunting*, Pemerintah Kota Cimahi hendaknya mengajak dunia usaha untuk menyisihkan dana pertanggungjawaban social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diperuntukkan untuk menambah atau melengkapi sarana-sarana yang ada baik itu di puskesmas atau posyandu dalam rangka menurunkan angka *Stunting* dan Pemerintah Kota Cimahi hendaknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara massif

kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda tentang bahayanya *Stunting* di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah. A. Chaedar. 2002. *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Azrul Azwar. 2004. *Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Binurupa Aksara.
- Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musanef. 1986. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamudji, S 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahayu, Amy dan Juwono, Wisnu. 2019. *Birokrasi dan Government: Teori, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Raho, Bernand. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan : Tinjauan dan Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Abdi Tandung.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto. 2009. *Dasar Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1998. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

## **Jurnal, Skripsi:**

- Ariati, L. I. P. (2019). *Faktor-faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting pada Balita Usia 23-59 Bulan*. Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan, 6(1), 28

<https://dx.doi.org/10.35316/oksitosin.v6i1.341>

A Dzaki Saputra. 2024. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*. Makassar: Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Djaiman, S.P.H., dan Sihadi. 2011. Peran Kontekstual terhadap Kejadian Balita Pendek Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan*. 34(1): 29-38.  
<http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/pgm/article/view/3109>

Erina Fahriza. 2021. Skripsi, *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar*. Riau. Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Fatoni, I. 2020. *Hubungan Inisiasi Menyusu Dini dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 12-24 Bulan*. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 66-79.  
<https://doi.org/10.35874/jib.v10i2.786>